# Pendapatan Daerah Stabil, NTB Tahan Laju Keterpurukan Ekonomi



[*https://suaramerdeka.com*](https://suaramerdeka.com)

Di tengah pandemi Covid-19, realisasi pendapatan daerah NTB menunjukkan tren membaik. Pada semester satu, realisasi pendapatan mampu dijaga sehingga tidak terpuruk. Pemprov mulai optimis mampu mencapai target hingga akhir tahun.

**”REALISASI**pendapatan daerah kita masih relatif baik,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Iswandi dalam keterangan pers, di kantor Bappenda NTB, Selasa (11/8).

Kondisi itu tercermin dari gambaran realisasi pendapatan secara umum. Dari target pendapatan setelah direvisi Rp 5,07 triliun lebih, realisasi semester I lalu mencapai Rp 2,6 triliun lebih atau 52,29 persen.

Realisasi pendapatan terus meningkat pada bulan Juli dan awal Agustus. Hingga 10 Agustus lalu, realisasi pendapatan sudah Rp 3,04 triliun lebih atau 60,09 persen.

Sumbangan terbesar pendapatan masih dari dana perimbangan, namun dari sisi persentase pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dengan 61,56 persen atau Rp 1,03 triliun lebih dari target Rp 1,6 triliun lebih.

Sedangkan dana perimbangan menyumbang Rp 1,9 triliun lebih dari target setelah revisi Rp 3,3 triiun lebih atau 59,38 persen. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah Rp 25,2 miliar atau 58,19 persen dari target Rp 43,3 miliar lebih.

Dari gambaran umum itu, sejauh ini dampak pandemi Covid-19 tidak terlalu besar. Artinya, pemprov mampu menahan tekanan dampak bencana Covid-19. Meski realisasi tidak meroket, tapai bila tanpa langkah antisipasi sejak awal kemungkinan pendapatan akan merosot. ”Kalau kita tidak antisipasi mungkin akan lebih buruk,” kata Iswandi.

Upaya-upaya yang dilakukan Bappenda NTB antara lain mengeluarkan kebijakan insentif pajak. Kebijakan itu direspons positif wajib pajak sehingga mereka memenuhi kewajibannya. ”Selain itu tim kami juga aktif, mendatangi wajib pajak dari rumah ke rumah,” katanya.

Selain pelayanan dari rumah ke rumah, tim Samsat juga memperluas layanan online. Hal itu memudahkan warga membayar pajak  di tengah pembatasan sosial. ”Ini juga tidak lepas dari sosialisasi media dan media sosial,” ujar Iswandi.

Semua upaya itu membuahkan hasil, sehingga bulan Juli tren realisasi pendapatan membaik. Realisasi retribusi daerah bahkan meningkat signifikan. Dari target Rp 14,08 miliar sudah terealisasi Rp 10,5 miliar atau 75,21 persen. ”Mudah-mudahan keadaan ini bisa kita pertahankan sehingga bisa capai target di akhir tahun,” harapnya.

Di luar upaya itu, sejak awal pemerintah sudah memperkirakan pendapatan akan berkurang 10-13 persen. Sehingga langkah antisipasi sudah disiapkan. ”Tugas kami di Bappenda adalah menahan laju (penurunan pendapatan) sebagai dampak dari covid ini,” katanya.

Langkah pertama yang diambil kala itu yakni menyesuaikan target pendapatan. Dengan begitu pemerintah bisa menyusun rencana belanja yang rasional. Target pendapatan direvisi dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 5,07 triliun lebih. ”Turun 10,5 persen atau berkurang sekitar Rp 599 miliar,” jelasnya.

**Pajak Daerah Paling Terdampak**

Meski pendapatan relatif stabil, tapi dampak Covid-19 terasa dalam perkembangan realisasi pendapatan bulan per bulan. ”Dampaknya mulai terasa sejak April,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah, Bappenda NTB H Muhammad Husni.

Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBKB) bulan Januari sampai Maret masih stabil. Namun turun drastis bulan April lalu. Kemudian mulai naik lagi bulan Mei, Juni, hingga Juli. ”Grafiknya terus meningkat,” ujarnya.

Hunsi menyebut, dari lima sumber pajak daerah yakni PKB, BBNKB, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok. Setoran pajak air permukaan dan pajak rokok yang tetap konsisten menyumbang pendapatan. Bahkan melampaui target bulan Juli.

Sedangkan sumber pendapatan paling terdampak adalah BBNKB. Dari target Rp 350,2 miliar lebih realisasi 31 Juli baru Rp 170 miliar atau 48,61 persen. ”Itu artinya pembelian kendaraan berkurang akibat pandemi,” jelasnya.

Konsumsi BBM juga berkurang selama pandemi. Hal itu tercermin dari realisasi pendapatan PBBKB baru Rp 143,7 miliar atau 56,86 persen dari target Rp 252,9 miliar. Sedangkan PKB baru terealisasi Rp 236,5 miliar atau 53,10 persen dari target Rp 445,4 miliar.

Pajak rokok teralisasi Rp 215,3 miliar lebih atau 66,17 persen dari target Rp 325 miliar lebih. Kemudian pajak air permukaan Rp 732,7 juta dari target Rp 1 miliar. Membaiknya setoran pajak air menunjukkan rehabilitasi pascagempa berjalan dengan baik. Pembagkit-pembangkit listrik yang rusak sudah mulai beroperasi. ”Dulu turun hingga 50 persen,” jelasnya.

Agar target pajak daerah tercapai di akhir tahun, pihaknya akan mengoptimalkan upaya dan strategi sampai akhir tahun. Pemberian insentif, kata Husni, cukup efektif. Tapi saat ini insentif dihapus. Bila situasi mendesak, kemungkinan insentif bisa dilakukan lagi. ”Tergantung sitausi,” jelasnya. (ili/r6/ADV)

**Sumber :**

# [*https://lombokpost.jawapos.com/*](https://mataramnews.co.id/)*,* Pendapatan Daerah Stabil, NTB Tahan Laju Keterpurukan Ekonomi, 12 Agustus 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:
2. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
* hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil kerja sama daerah;
* jasa giro;
* hasil pengelolaan dana bergulir;
* pendapatan bunga;
* penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
* penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
* penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
* pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
* pendapatan denda pajak daerah;
* pendapatan denda retribusi daerah;
* pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
* pendapatan dari pengembalian;
* pendapatan dari BLUD; dan
* pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. pendapatan transfer; dan
2. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah